

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi Daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko kedepan

Perkembangan inflasi Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada indek inflasi Kota Bukittinggi atau Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan inflasi Sumatera Barat sepanjang 2024 adalah sebagai berikut :

Oktober	November	Desember
1,65%	0.80%	0.89%

Pada Oktober 2024 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,65 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,24. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 2,56 persen dengan IHK sebesar 106,81 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 1,38 persen dengan IHK sebesar 106,18. Secara *month to month (m-to-m)* Provinsi Sumatera Barat bulan Oktober 2024 mengalami inflasi sebesar 0,11 persen. Hingga Oktober 2024, inflasi *year to date (y-to-d)* Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,26 persen.

Pada November 2024 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,80 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,53. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 1,29 persen dengan IHK sebesar 107,19 dan terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 0,10 persen dengan IHK sebesar 106,77. Secara *month to month (m-to-m)* Provinsi Sumatera Barat bulan November 2024 mengalami inflasi sebesar 0,27 persen. Hingga November 2024, inflasi *year to date (y-to-d)* Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,54 persen.

Pada Desember 2024 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,89 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,90. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bukittinggi sebesar 1,68 persen dengan IHK sebesar 106,38 dan terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 0,37 persen dengan IHK sebesar 107,55. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,87 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,15 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,79 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,31 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,73 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,39 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,49 persen. Sementara itu, kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,09 persen; kelompok transportasi sebesar 0,11 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen. Secara *month to month (m-to-m)* Provinsi Sumatera Barat bulan Desember 2024 mengalami inflasi sebesar 0,35 persen. Hingga Desember 2024, inflasi *year to date (y-to-d)* Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,89 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Ekonomi Sumatera Barat menunjukkan tren positif dengan terjadinya deflasi selama tiga bulan berturut-turut. Penurunan harga sejumlah komoditas, terutama cabai merah, menjadi faktor utama penyebab deflasi ini. Didorong oleh peningkatan pasokan cabai merah baik dari dalam maupun luar daerah. Selain cabai, penurunan harga bensin dan kentang juga turut berkontribusi. Penurunan harga cabai merah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan deflasi terdalam. Hal ini tidak terlepas dari penurunan harga cabai merah, ikan, dan garam di daerah tersebut. Deflasi yang terjadi di Sumbar merupakan kabar baik bagi masyarakat. Namun, kita perlu tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga pada komoditas lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya menjaga stabilitas harga. Berbagai langkah telah dilakukan, seperti operasi pasar, koordinasi dengan petani, serta sosialisasi kepada masyarakat. Deflasi yang terjadi di Sumatera Barat pada September 2024 merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga. Ketersediaan pasokan yang cukup, terutama pada komoditas pangan, menjadi faktor kunci dalam menekan inflasi. Kondisi ini bersifat dinamis. Perubahan cuaca, permintaan pasar, dan faktor lainnya dapat mempengaruhi harga komoditas. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh stakeholder terkait perlu terus bekerja sama untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Tahun 2024 sebesar **+ 6 M**. Berkurang cukup signifikan dengan keluarnya PMK terkait dana yang Terutama pada Dinas Tanhorbun.
2. Pada tahun 2024 beberapa kegiatan rutin tetap dilakukan diantaranya, Gerakan Pasar Murah, Pemantauan harga ke Pasar-pasar Nagari, Pengecekan stok Beras ke BULOG, Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dan Pelaporan harga bahan pokok.
3. Pemantauan dan Pelaporan harga setiap hari melalui SP2KP dan Web Panel Harga dan pelaporan berkala ke Irjen Mendagri oleh OPD Terkait
4. Pemantauan Gerakan Menanam oleh Bupati dan TPID ke kebun Masyarakat dan gerakan pengamanan
5. Lanjutan Bantuan Pangan dari Pemerintah Daerah sumber dana APBD Kab Lima Puluh Kota kepada 54.000 KK Miskin desil 1-4 berdasarkan Data P3KE.
6. Gerakan Menanam Cabe bersama Kelompok Tani dan Ibu-Ibu PKK secara serentak dari tingkat Nasional
7. Capacity Building TPID Kabupaten Lima Puluh Kota di Hotel Mangkuto Payakumbuh
8. Rabu, 8-9 Oktober 2024, Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan Dinas Perikanan Lima Puluh Kota melaksanakan Bimbingan Teknis CBIB untuk revitalisasi kolam rakyat di Pokdakan Piseb, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh.

Kegiatan penyerahan bantuan benih sebanyak 20.000 ekor dan pakan ikan nila kekar

9.

untuk Pokdakan Tanjuang Saiyo, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka. Kamis, 10 Oktober 2024.

10. pada tanggal 22 Oktober hingga 24 Oktober 2024. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti rangkaian event Livestock Expo 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat di Pasar Ternak Payakumbuh.
11. Bimtek Pembinaan kepada Kelompok Usaha Bersama dan Pengolahan ikan yang diadakan oleh Nagari Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru (22 s/d 25 Oktober 2024).
12. Selasa tanggal 3 November 2024 Dinas Perikanan melaksanakan Bimbingan teknis dan Penyerahan bantuan sosial budidaya ikan dalam ember (Budikdamber) sebanyak 120 paket untuk 40 KK di Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru.
13. Tanggal 13 November 2024 s.d 14 November 2024 Dinas Perikanan melalui bidang PPI melaksanakan Bimtek Pembenihan Ikan Lele, Gurami dan Mas di Aula Dinas Perikanan dan untuk prakteknya berlangsung di BBI Tarantang dan Air Putih.
14. Pada 18-19 November 2024, Dinas Perikanan melalui bidang PPI melaksanakan Bimtek Pembenihan dan Pembesaran Ikan Air Tawar yaitu ikan lele dan ikan mas.
15. Pada 25 November 2024 Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan Bimbingan teknis pengolahan bahan pangan asal hewan (25/11) yang diikuti oleh perwakilan ibu2 PKK dr 5 Kecamatan Guguk, Mungka, Suliki, Gunung Omeh dan Bukit Barisan.
16. 28-29 November 2024 Training/Pelatihan Petugas dan Penyuluh Perikanan Kab.50 Kota di Lokasi Wisata Edukasi Graha Pratama Fish Kampung Patin, Kab. Kampar.
17. Pada Tanggal 29 November 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan Sekolah lapang Integrasi Jeruk Kambing (IntegJerKam) Di Kelompok Tani Pucuak Mudo Sungai Dodok Koto Tinggi
18. Rabu, 4 Desember 2024 Bimbingan Teknis dan Penyerahan Bantuan Sosial Demplot Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber) di Nagari Limbanang Kec. Suliki sebanyak 81 paket untuk 27 Kk miskin
19. Kamis, 5 Desember 2024 Bimbingan Teknis dan Penyerahan Bantuan Sosial Demplot Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber) di Nagari Sitanang Kec. Lareh sago halaban. sebanyak 120 paket untuk 40 Kk miskin diberikan Bimbingan teknis dan Bantuan Budikdamber.
20. 09 Desember 2024 Bimtek di Pokdakan Tanjuang Sakato Nagari VII Koto Talago Kec. Guguk.
21. Dinas Pangan tanggal 18 Desember 2024 melaksanakan Gerakan Pasar Murah (GPM) dalam rangka menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Keliling Nagari.
22. Selasa, 19 Desember 2024 Dinas Perikanan melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan melakukan Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari.
23. Rabu, 20 Desember 2024 Dinas Perikanan melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan melakukan Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) di Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kec. Akabiluru.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memaparkan sejumlah strategi dalam mengendalikan laju inflasi tetap terjaga

pada angka 2,5 plus minus satu persen secara *year on year* (yoy).Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang dilakukan yakni menyelenggarakan pasar murah di berbagai kabupaten/kota menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

2. Selanjutnya, TPID juga berupaya menjaga kelancaran distribusi barang maupun jasa pasca bencana hidrometeorologi melalui percepatan perbaikan akses jalan yang terdampak atau putus total dan banjir lahar dingin Gunung Marapi turut berimbas pada inflasi di Ranah Minang. Sebab, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat menjadi terganggu akibat gagal panen terutama di daerah yang selama ini pemasok berbagai kebutuhan. Termasuk juga terbatasnya akses jalan untuk mengirimkan hasil pertanian
3. Termasuk memprioritaskan kendaraan logistik pengangkut komoditas pangan di jalur-jalur alternatif yang dibantu pihak kepolisian setempat. Selanjutnya, agar laju inflasi tetap terjaga sesuai target TPID melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi harga serta ketersediaan pasokan di pasar.
4. Tidak hanya itu, langkah lainnya yakni dengan mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan stok pangan komersial oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).
5. TPID juga menguatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait melalui rapat koordinasi teknis mengenai pengendalian inflasi.
6. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi agar tetap berada di sekitar target yang telah ditetapkan, yakni 2,5 1 persen yoy. "Kami terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan inflasi tetap terkendali, khususnya di sektor pangan yang sangat mempengaruhi inflasi di Sumatera Barat.
7. Beberapa upaya yang terus dilakukan TPID di antaranya adalah penyelenggaraan operasi pasar di berbagai kabupaten/kota untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok, rapat koordinasi untuk sinkronisasi neraca pangan, serta monitoring dan evaluasi harga-harga di pasar. Selain itu, TPID juga aktif dalam distribusi beras ke masyarakat, capacity building, dan memperkuat komunikasi efektif terkait inflasi.
8. Memperkuat pengendalian inflasi pangan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya menekan inflasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara keseluruhan.
9. Koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta TPID, upaya pengendalian inflasi di Sumatera Barat diharapkan dapat terus berjalan lancar dan sesuai target, sehingga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi provinsi ini dapat terjaga
10. Alokasi anggaran pengendalian inflasi daerah diarahkan untuk program dan kegiatan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif. Perlunya ditingkatkan kapasitas anggota TPID untuk lebih memahami tugas dan fungsi TPID dalam upaya pengendalian inflasi Daerah.
11. Koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan komunikasi efektif antar Kabupaten dan Kota serta Pemerintah Provinsi untuk optimalisasi pelaksanaan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Bersama Tim TPID mengidentifikasi alokasi anggaran pada perangkat daerah untuk mendukung program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah yang berkesinambungan

dari TW I- TW IV.

3. Mengarahkan program kegiatan pada kegiatan :
4. Pemantauan harga dan stok
5. Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah
6. Menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang dan bahan pokok
7. Pencanaan gerakan menanam
8. Operasi pasar murah
9. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor
10. Meningkatkan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi